

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semenanjung Korea adalah daerah militerisasi di wilayah Asia - Pasifik. Ketegangan politik yang terjadi di wilayah tersebut selalu menjadi perhatian dari banyak pihak internasional. Kekalahan kekaisaran Jepang pasca Perang Dunia II membuat Semenanjung Korea dikuasai oleh pihak Sekutu. Amerika Serikat dan Uni Soviet membagi Korea pada garis lintang 38 di utara khatulistiwa dan menghasilkan pembentukan dua negara yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Kedua Korea mulai terlibat dalam konflik perbatasan dan memanas ketika Korea Utara melakukan serangan ke Korea Selatan pada 25 Juni 1950 dan berakhir pada 27 Juli 1953. Perang ini dideklarasikan sebagai perang resmi oleh Amerika Serikat sebagai mandat atau *proxy war* untuk Perang Dingin tanpa melibatkan Korea dalam perjanjian ini, Amerika Serikat bersekutu dengan PBB serta Uni Soviet beraliansi dengan China. (Sue, 2014)

Keterlibatan lima pihak yaitu Korea Selatan dan Korea Utara, Uni Soviet, Amerika Serikat, China dan Jepang menjadikan keenamnya berusaha mempertahankan dan meningkatkan posisinya pada wilayah tersebut, Korea telah menjadi objek konflik dan jalur invasi untuk tiga negara *Great Powers* yaitu Rusia, Amerika Serikat dan Jepang. China memberi dukungan untuk serangan Korea Utara dalam Perang Korea di tahun 1950 sebagai bentuk balasan terhadap intervensi Amerika Serikat kepada Korea Selatan. Kedekatan antara pemimpin *Chinese Communist*

*Party* dan *Korean Workers Party* yang dipimpin oleh Kim Il Sung memperkuat alasan China untuk memperhitungkan kebijakannya dengan Korea. China mengirimkan tentara sukarelawan rakyat (*People Volunteer Army*) untuk melawan pasukan Korea Selatan. Partisipasi PVA membuat hubungan Korea Selatan dan China menjadi tidak baik. Setelah berakhirnya perang Korea pada Juli 1953, terbentuklah zona demiliterisasi Korea dan China menarik pasukannya dari semenanjung Korea.

Pasca terjadinya perang dingin, stabilitas keamanan di Semenanjung Korea masih menjadi ancaman bagi negara di sekitarnya. Perang ini berubah menjadi perang internasional yang melibatkan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menjadi awal mula perselisihan diantara Korea Selatan dan Korea Utara yang berpisah karena perbedaan ideologi yang dipengaruhi oleh intervensi dari pandangan liberal dan komunis. Walaupun perang ini sudah selesai, secara teknis kedua negara ini masih berselisih karena tidak adanya perjanjian yang dibuat untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya. Setelah perang, pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menjadi makmur di bawah serangkaian sistem kapitalis dan menjadi negara demokrasi. Sedangkan Korea Utara hidup di bawah kediktatoran keluarga yang sama selama tiga generasi dan perkonomian yang berada di bawah garis kemiskinan. Sejarah kelam yang terjadi di semenanjung Korea menjadikan keamanan Korea Selatan dijamin oleh Perjanjian Pertahanan Bersama (*Mutual Defense Treaty*) dengan Amerika Serikat sedangkan Korea Utara berada di bawah ikatan pakta militer dengan China ketika diserang. Ketidakpastian mengenai daerah sensitif, militeris, dan situasi yang

dinamis telah menimbulkan tantangan serius bagi tujuan regional China dan menarik perhatian bagi pembuat kebijakan luar negeri China. Keterlibatan China dalam konflik Korea terjadi mengingat bahwa China memiliki hubungan sejarah dan letak geografis semenanjung Korea sangat mempengaruhi keamanan negara China.

Walaupun perang telah usai kedua negara tetap melakukan gencatan senjata yang menyebabkan Korea Utara mengeluarkan ancaman nuklir yang sewaktu-waktu bisa menyerang Korea Selatan. Korea Utara sempat mengajukan pengunduran diri dari Perjanjian Anti Penyebaran Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) pada tahun 1993 yang kemudian ditunda dan dilanjutkan pada tahun 1994 di mana Amerika Serikat dan Korea Utara menandatangani kesepakatan untuk menutup reaktor nuklir di Yongbyon (Martin, 2011). Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tentu menjadi kekhawatiran untuk berbagai pihak. Walaupun sudah mendapat banyak kecaman dari dunia internasional, hal tersebut membuat Korea Utara semakin gencar dalam mengembangkan senjata nuklirnya.

Pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dianggap sebagai bentuk pertahanan rezim Korea Utara dan menjadi simbol kekuatan sebuah negara. Bukan hanya Korea Utara, tetapi banyak negara di dunia yang mencoba untuk menciptakan sistem persenjataan yang kuat. Walaupun sampai saat ini hal tersebut menjadi polemik karena pembuatan senjata memiliki daya rusak yang besar dan dapat mendorong adanya pembatasan dalam pembuatannya. Korea Selatan memiliki

kewaspadaan tinggi terhadap segala macam uji coba dan perkembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Untuk itu, Korea Selatan mempersiapkan serangan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dengan memasang sistem kendali anti nuklir yaitu *Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* milik Amerika Serikat.

*Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)* merupakan sistem pertahanan anti rudal yang dibuat di bawah kendali *Missile Defense Agency* yang dikerjakan oleh Lockheed Martin, sebuah perusahaan pembuat senjata dan teknologi penerbangan. THAAD diidentifikasi sejak tahun 1980-an dan akhirnya dapat dikembangkan ketika Pasukan Irak melakukan serangan terhadap target koalisi rudal Scud buatan Rusia selama Perang Teluk. THAAD menggunakan pencegat *hit-to-kill* satu tahap untuk menghancurkan target rudal yang masuk ke dalam suatu wilayah baik di dalam maupun luar atmosfer bumi pada jarak 200 km, yang dapat mengurangi efek senjata pemusnah massal sebelum mereka mencapai tanah (Center For Strategic and International Studies, 2018)

Amerika Serikat mengusulkan penyebaran THAAD sejak 2014 dan memulai diskusi resmi pada 7 Februari 2016. Pada tanggal 13 Juli 2016 diumumkan bahwa THAAD akan dipasangkan di pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan di daerah Seongju yang terletak 200 kilometer di tenggara kota Seoul. Tempat ini dipilih secara strategis untuk melindungi kota-kota Busan, Ulsan, dan Pohang dari serangan rudal Korea Utara. Kota-kota tersebut menjadi bala bantuan dan pasokan Amerika Serikat jika terjadi serangan, dan pabrik nuklir utama, serta penyimpanan fasilitas

minyak berada. Pemasangan THAAD dimulai lebih cepat dari jadwal pada April 2017, dengan dua dari enam peluncur THAAD dioperasikan pada 2 Mei 2017. Hal ini dilakukan tepat sehari setelah Korea Utara meluncurkan empat rudal balistik yang kemudian jatuh di perairan Jepang. Penempatan THAAD dipercepat untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan operasional langsung dari THAAD, sebagai tanggapan atas meningkatnya ancaman nuklir dan rudal balistik Korea Utara. (ISDP, 2017)

Pemasangan sistem anti nuklir THAAD mendapat berbagai respon yang menganggap bahwa pemasangan tersebut tidak memiliki manfaat untuk Korea Selatan. Korea Utara menyatakan kemarahannya dan menyalahkan Amerika Serikat sebagai intervensi yang bisa merusak hubungan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Selain itu China memberikan protes serta penolakan atas kebijakan yang dibuat oleh Korea Selatan untuk mengaktifkan sistem pertahanan rudal milik Amerika Serikat. Akibatnya, China memberikan sanksi berupa penutupan 85 toko besar Lotte Mart, melemahkan pasar penjualan Hyundai motor, pembatasan akses hiburan Korea Selatan di China, larangan grup pariwisata dari China ke Korea Selatan. Secara ekonomi, banyak bisnis Korea Selatan yang mengalami kerugian atas kejadian ini, penjualan Hyundai di China turun hingga 64% pada kuartal kedua di tahun 2017, penjualan supermarket Lotte turun hingga 95%, pelarangan kunjungan pariwisata yang merugikan pendapatan sebesar \$15,6 miliar.

Walaupun Korea Selatan telah menegaskan bahwa pemasangan THAAD tidak akan mempengaruhi keamanan negara milik China akan tetapi, China masih tetap tegas memberikan pernyataan bahwa hubungan keduanya menjadi tidak terpercaya.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa China menolak kebijakan sistem pertahanan anti rudal *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) yang dilakukan oleh Korea Selatan di tahun 2016-2017?

## **C. Kerangka Pemikiran**

### 1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional (*national interest*) adalah konsep yang dipakai untuk menganalisa hubungan internasional sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara. Konsep ini diciptakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan dalam bentuk apa saja agar dapat mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Menurut Morgenthau, gagasan pendekatan kepentingan nasional secara umum menyerupai konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal, seperti kesejahteraan umum dan hak perlindungan hukum. Isi konsep tersebut ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural secara keseluruhan di dalam suatu negara dalam merumuskan politik luar negerinya (McCourt, 1954, pp. 82-83) Arti minimum inheren dalam

konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup (*survival*), dalam pandangan Morgenthau kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa yang lain. Negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (identitas fisiknya) mempertahankan rezim ekonomi-politik (identitas politiknya) yang mungkin demokratis, otoriter, sosialis atau komunis, dapat memelihara norma-norma etnis, religious, linguistik, dan sejarahnya (identitas kultural). Konsep kepentingan nasional merupakan substansi politik dan oleh karena itu tidak akan terpengaruhi oleh waktu dan tempat. Tetapi nekemaara nasional adalah produk sejarah dan bukan apa-apa selain memiliki perubahan, jadi hubungan antara kepentingan dan negara dapat berubah sesuai waktu dan tempatnya. “*selama dunia diatur secara politik ke dalam negara-negara, elemen yang diperlukan dalam kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup*” dengan kata lain kebijakan luar negeri berbasis pada kelangsungan hidup mudah didukung oleh bipartit. Situasinya tidak akan sama dengan faktor-faktor yang dapat merubah kepentingan nasional.

Untuk dapat mencapai kepentingan setiap negara, sebagai aktor internasional mereka membutuhkan suatu instrument berupa *power* atau kekuatan nasional. Kekuatan ini dapat dipahami sebagai kapasitas suatu aktor untuk mengendalikan aktor lain baik dengan cara mempengaruhi atau memaksa. Menurut Morgenthau, “*International politics, like all politics, is a struggle of power*”. Aktivitas politik antar negara merupakan perjuangan demi kekuatan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dalam anarki, diperlukan keselarasan negara dengan

menyeimbangkan posisi satu sama lain dalam konstelasi politik keamanan internasional melalui *balance of power*. Negara memiliki *self-regarding behaviour* atau mementingkan diri sendiri dengan dasar *instinct of survival*. (Pettman, 1991, p. 54). Sistem internasional berkembang dalam anarki internasional yang bukan hanya sebagai bentuk pemerintahan dunia atau otoritas di atas negara-negara, tetapi karena setiap negara memiliki kedaulatan yang setara dalam sistem internasional (Jackson & Sorensen, 2013) . Atas dasar tersebut, negara tidak akan mencapai konsensus mengenai otoritas dunia karena terdapat *security dilemma* atau kecurigaan atas satu sama lain sebagai pihak yang mencancam keamanan nasionalnya. Negara akan selalu merasa tidak aman dan tidak mau keuntungannya diambil oleh negara lain, sehingga negara selalu berada dalam kecemasan dan berperilaku kompetitif untuk mendapat kekuatan sebesar-besarnya dalam sistem internasional (Pettman, 1991)

Kontradiksi kekuatan dan kelemahan China sangat mempengaruhi kualitas, perilaku dan kebijakan dalam dunia internasional. China memiliki kekuatan militer yang penting bagi dunia, dengan perkembangan nuklir yang pesat serta kapasitas konvensional. Selama 1 dekade China telah mengutamakan keamanan nasionalnya untuk melindungi kepentingan investasi ekonominya yang telah berkembang pesat dan untuk melindungi warga negaranya yang bekerja dalam mendukung investasi ini. China menganggap bahwa selama dekade terakhir masalah keamanan telah menjadi lebih serius dan kompleks secara kualitatif. Kecemasan China salah satunya adalah dengan Amerika Serikat atau NATO dan sekutunya di wilayah perbatasan. Kepentingan nasional China



adalah meningkatkan semua asset keamanan nasional baik secara militer maupun sipil.

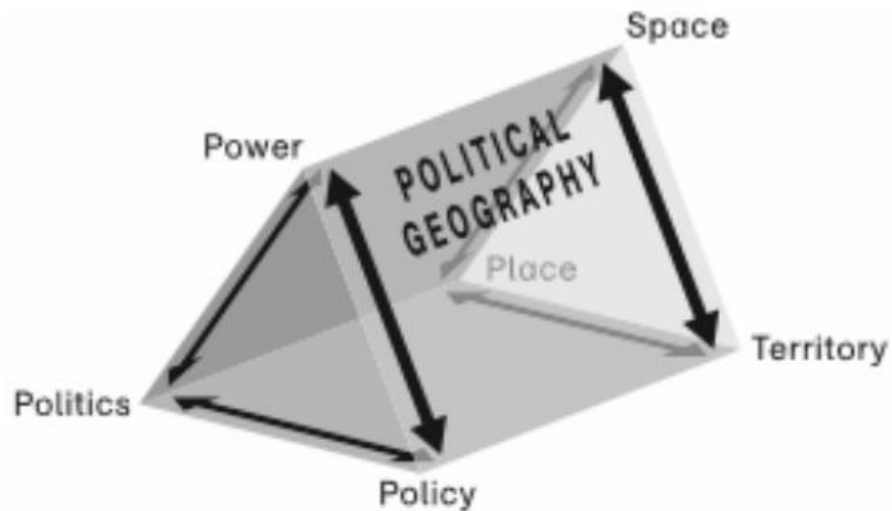
Analisa keseimbangan militer di kawasan Asia Timur menjadi prioritas tinggi bagi China, hal ini menjadi dasar bahwa sebagian besar rasionalitas militer akan menjadi faktor penentu dalam tindakan China. Oleh karena itu, analisis keseimbangan kekuatan militer harus dikombinasikan dengan analisis kebijakan China dalam mempertimbangkan prospek masa depan. Kepentingan China adalah ingin mengakhiri “hegemoni” Amerika Serikat di dalam komunitas internasional. Mengingat hal ini China berusaha untuk mempertahankan lingkungan internasional yang damai dan memungkinkan reformasi sebagai upaya liberalisasi untuk mencapai kepentingan China. Lingkungan seperti itu bisa memastikan modal dan teknologi China dapat diekspor ke mitra dagang seluruh dunia, terutama ke pasar Amerika dan Jepang. Keputusan China terhadap Korea Selatan hanya bertindak untuk mempertahankan *status quo*, China terlihat lebih agresif terhadap Korea Selatan dikarenakan pemasangan THAAD mengancam kepentingan nasionalnya, mengingat bahwa alat ini milik Amerika Serikat. Sebaliknya China tidak memiliki respon agresif kepada Korea Utara, yang seharusnya lebih mengancam, melihat letak negara diantara keduanya lebih berdekatan. China menunjukkan bahwa mereka menolak gagasan Korea Utara mengenai pengembangan senjata nuklir dan rudal. Tetapi mereka juga tidak ingin melihat Korea Utara runtuh sebagai sebuah negara dan tunduk terhadap Amerika Serikat. Prioritas tertinggi China saat ini adalah untuk menjaga kepentingan dalam

negerinya sebagai jangka panjang untuk menjadi negara yang kaya dan militer yang kuat.

## 2. Teori Geopolitik

Geopolitik dalam hubungan internasional merupakan ilmu yang mengkaji masalah dalam perspektif ruang atau geosentrik, ilmu ini mempelajari bagaimana faktor geografi wilayah atau tempat tinggal mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara atau bangsa. Istilah geopolitik dicetuskan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik (*Political Geography*), kemudian dikembangkan oleh Rudolf Kjellen dan Karl Haushofer menjadi *Geographical Politic*. Walaupun terlihat sama tetapi keduanya memiliki fokus perhatian yang berbeda. *Political Geography* mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan *Geographical Politic* mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Pandangan Ratzel mengenai geopolitik menghasilkan dua aliran kekuatan yaitu berfokus pada kekuatan di darat (kontinental) dan berfokus pada kekuatan di laut (maritim) (Cahnman, 1943).

Martin Jones, mendefinisikan geopolitik dan geografi politik sebagai konsep yang saling mengisi. Konsep geopolitik membahas mengenai negara sebagai aktor hubungan politik dan interaksi geografi yang dilakukan oleh entitas negara, dan mencakup strategi eksternal dari negara hingga *global balance of power*. Jones menggunakan aspek politik dan geografi secara satu persatu untuk memperjelas konsep geopolitik (Jones, et al., 2014).



**Sumber: An Introduction of Political Geography: Space, Place, and Politics**

Berdasarkan gambar tersebut terdapat enam faktor penentu dalam politik dan geografi. Sisi pertama mengenai keterkaitan *power*, *politics*, dan *policy*. *Power* dianggap sebagai penghubung antara *politics* dan *policy*. Konsep *power* dapat dianggap sebagai “*capacity of act*”, dimana fungsinya untuk menggunakan atau mengerahkan kekuatan yang dimiliki aktor secara material maupun nilai. *Power* dalam hal ini mencakup kendali wilayah, kendali informasi, proses sosialisasi dan indokrinasi. *Politics* merupakan kumpulan proses yang terlibat dalam mencapai (*achieving*), menggunakan (*exercising*), dan mengahalui (*resisting*) *power*. *Policy* merupakan output atau keputusan akhir yang sudah direncanakan atau diinginkan. Keterkaitan *power*, *politics*, dan *policy* dalam kasus ini menunjukkan bahwa China sebagai negara “*rising great power*” menganggap bahwa pemasangan THAAD ini ancaman bagi seluruh kawasan Asia Timur dan bagi China sendiri. Selama ini Amerika Serikat dan China adalah negara yang paling signifikan memiliki pengaruh paling

kuat dalam kepentingan di wilayah semenanjung Korea. China yang beraliansi dengan Korea Utara dan Rusia selama ini menentang hubungan Amerika Serikat yang berada dibelakang Korea Selatan. Untuk menjaga stabilitas keamanan di semenanjung Korea, sebagian kebijakan keamanan regional China di Asia Timur dipengaruhi oleh keadaan dalam dan luar semenanjung Korea. Terkait dengan *power* di dalam geopolitik legitimacy *power* yang mengacu pada negara yang diakui oleh negara lain sebagai pemilik keistimewaan, hak, dan kewajiban tertentu dalam mempengaruhi perdamaian dan keamanan sistem internasional.

Dalam faktor *politics* hubungan politik adalah mengenai sejauh mana suatu negara melakukan kendali politik atas pengaruh negara lain. Perseteruan China dengan Jepang juga tidak lepas dari upaya kedua negara tersebut untuk bisa mendominasi aliansi didalam semenanjung Korea. Secara historis Korea telah menjadi kunci yang mengendalikan kepentingan keamanan nasional bagi Jepang dan China. Situasi ini dianggap semacam keseimbangan kekuatan atau *equilibrium* diantara enam pihak yaitu; China – Korea Utara – Korea Selatan – Amerika Serikat – Jepang – Rusia. Masing-masing negara terus menerus berinteraksi dan menyesuaikan hubungan mereka dan berusaha untuk terus meningkatkan posisinya dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk mencapai tujuan regionalnya secara objektif, China tidak segan untuk mengembangkan kebijakan yang bisa melawan manipulasi kekuatan super power dari negara lain, hal ini terutama untuk dapat mencapai tujuan regionalnya. Hal ini ada didalam faktor *policy* sebagai

rangkuman semua hasil yang berkaitan berdasarkan keputusan melalui proses *politics* dan menjadi acuan bagi *power* untuk diimplementasikan.

Pada sisi kedua bagan segitiga *political geography* menurut Jones adalah faktor *space*, *place*, dan *territory*. *Territory* merupakan batas wilayah yang mana ini merupakan hal penting untuk melihat batas dari ruang atau *space* yang ada. *Territory* merepresentasikan skala yang memungkinkan terjadinya intervensi yang dilakukan oleh suatu negara dengan membentuk regulasi terhadap batas wilayah yang melibatkan hubungan antar negara China ingin mencapai kebijakan luar negeri yang independen dan damai. Tujuan China ini membutuhkan semenanjung Korea berada dalam keadaan stabil. Karena setiap perkembangan di dalam dan sekitar semenanjung Korea akan menyebabkan ketidakstabilan dan dianggap dapat merugikan China. Mengingat bahwa semenanjung Korea merupakan daerah militer maka China berharap bahwa keadaan menjadi tenang dan reunifikasi damai untuk kedua negara Korea secara bertahap akan terwujud. Mengacu pada geografi *space* merupakan ruang atau dalam arti lain sebagai *place*, yang secara spesifik adalah membahas tentang negara. Keduanya membahas tentang persimpangan antar aspek sosial, ekonomi, dan budaya terjadi. *Place* memiliki karakteristik fisik seperti acuan terhadap geografis mengenai landscape wilayah, ekonomi mengenai sumber daya alam dan struktur sosial yang melibatkan suatu identitas.

China memberikan statement mengenai ketidakpuasaan dan penolakan yang besar terhadap pemasangan THAAD akan sangat

menyabotase kepentingan keamanan strategis kawasan Asia Timur terutama China. THAAD sebagai ancaman yang jelas, sekarang, dan substantive bagi kepentingan keamanan china.

Sanksi yang diberikan China terhadap Korea Selatan adalah kebijakan yang berkaitan dengan isu geopolitik dan konflik di Asia Timur, dengan kehadiran Amerika Serikat dikawasan tersebut terutama melalui banyaknya pangkalan militer di Jepang dan Korea Selatan. Hal tersebut dapat menjadi gangguan jangka panjang untuk kepentingan militer, diplomatik, dan ekonomi China di wilayah tersebut (Banka, 2020).

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan dengan kepentingan nasional China merasa bahwa pemasangan THAAD di Korea Selatan akan melemahkan posisi China di kawasan Asia Timur dan mengganggu stabilitas geopolitik di semenanjung Korea

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sistem politik dan hubungan politik luar negeri China dan negara lainnya.
2. Mengetahui pembangunan THAAD di Korea Selatan dan hubungannya dengan China.
3. Untuk memahami alasan penolakan China terhadap kebijakan Korea Selatan mengaktifkan sistem pertahanan anti rudal THAAD.

## **F. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan pengumpulan data dengan *library research* atau pengumpulan data kepustakaan. Penulis berharap dapat menemukan beberapa data dan fakta yang sesuai dengan masalah. Penelitian perpustakaan akan membantu penulis untuk menjelaskan secara teoritis permasalahan yang muncul dan menganalisis hipotesis. Data akan diambil dari jurnal, buku, artikel, dan media lainnya seperti internet yang masih terkait dengan isu yang dibahas.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk menyederhanakan penelitian, penulis akan membatasi periodisasi persoalan agar tidak menyimpang terlalu jauh dan memudahkan untuk memahami serta menganalisa permasalahan yang ada. Fokus penelitian ini berada pada periode tahun 2016-2017, 2016 adalah awal pembicaraan pertama pemasangan THAAD di Korea Selatan kemudian di tahun 2017 kasus penolakan China terhadap kebijakan tersebut muncul. Namun data dan informasi yang berada di luar rentang waktu tersebut masih bisa digunakan selama masih dianggap layak untuk digunakan.

## **H. Sistematika Penulisan**

### **Bab I**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, landasan konseptual, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan

### **Bab II**

Bab ini akan menjelaskan mengenai China, politik dan sistem pertahanan China, beberapa hubungan diantara China dan beberapa negara yang akan berelasi dengan hubungan antara China dan Korea Selatan.

### **Bab III**

Bab ini akan menjelaskan mengenai THAAD di Korea Selatan. Hubungan antara Korea Selatan dan China dalam pemasangan THAAD dan respon penolakan China terhadap kebijakan tersebut.

### **Bab IV**

Bab ini akan menjelaskan alasan penolakan China terhadap kebijakan Korea Selatan memasang THAAD.

### **Bab V**

Bab ini berisi kesimpulan dan penutup yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya.